

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi, Anti-Fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Bengkalis)

Nadia Wati¹, R. Septian Armel², Siti Samsiah³
Universitas Muhammadiyah Riau -¹nadiawati1906@gmail.com
-²Septianarmel@umri.ac.id
-³sitisamsiah@umri.ac.id

Abstrak— The objective of this study is to examine and analyze the influence of the Government Internal Control System, organizational culture, and anti-fraud awareness on fraud prevention in urban village governments (kelurahan) in Bengkalis Regency. The population in this study consists of all urban village employees in Bengkalis Regency, comprising 19 kelurahan. The sampling technique used in this study is purposive sampling. The selected sample includes 4 individuals from each kelurahan: the Head of Kelurahan (Lurah), the Secretary of Kelurahan, the Head of the Economic Business Group (UEK), and the Treasurer of the UEK, resulting in a total sample of 76 respondents. The type of data used is primary data obtained from questionnaires. The data analysis technique employed is multiple linear regression using SPSS version 24. The results show that the Government Internal Control System, organizational culture, and anti-fraud awareness significantly influence fraud prevention.

Keywords: Government Internal Control System, Organizational Culture, Anti-Fraud Awareness, Fraud Prevention

1. PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) dapat mengancam keberlangsungan perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam dokumen survei fraud Tahun 2020 yang berjudul Report to The Nations, Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan fraud kedalam tiga kategori umum, yaitu fraud dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Hasil Survei Fraud Indonesia (SFI) Tahun 2019 yang diterbitkan ACFE Indonesia menunjukkan bahwa organisasi/lembaga yang paling dirugikan akibat dari fraud adalah pemerintah. Survei tersebut juga menyatakan bahwa fraud yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian di Indonesia adalah korupsi. Hasil survei kepada 1.166 peserta Workshop Anti Korupsi yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun 2021 melalui Youtube Channel BPK RI Official menunjukkan bahwa jenis entitas yang paling rentan terjadi korupsi adalah Pemerintah Daerah (Pemda) (Az-Zahra, 2024).

Salah satu kasus fraud yang terjadi pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Beberapa fenomena yang ditemukan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana UEK SP yang terjadi di Kabupaten Bengkalis antara lain: kasus dugaan Tindak Pidana (TP) Korupsi Dana Milyaran Rupiah di UEK SP Maju Bersama di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis masih saja dalam proses penyelidikan pihak Tipikor Polres Bengkalis (<https://liputan4.com/2024>), selanjutnya kasus Korupsi UEK-SP Bukit Batu Tri Laksamana yang dilakukan oleh Andri Wahyudi (Ketua UEK-SP), Subandi (Bagian Tata Usaha) dan Jaafar mantan kepala Desa Bukit Batu merugikan negara sebesar 1,053 miliar. terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah kelurahan. Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa Jaafar menggunakan 9 nama peminjam fiktif, Andri menggunakan 20 nama fiktif dan Subandi menggunakan 14 nama fiktif. Puluhan nama fiktif itu, mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi, dengan total Rp1.053.755.000. Oleh ketiga terdakwa, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi (<https://riau.bpk.go.id>, 2020).

Dari beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi pada kelurahan di Kabupaten Bengkalis, hal

ini mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan dalam upaya pengawasan serta pencegahan korupsi yang termasuk ke dalam bentuk fraud. Pencegahan fraud penting untuk menghindari kerugian finansial yang signifikan, karena pengadaan melibatkan nilai uang yang besar. Pencegahan fraud dapat menjaga reputasi organisasi, mengingat kasus-kasus penipuan dalam pengadaan dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengadaan, yang umumnya memiliki regulasi yang ketat. Hal ini penting karena akan menghasilkan tahapan pengadaan yang lebih efektif serta tepat guna dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dengan persaingan yang wajar. Pencegahan fraud juga sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan (ACFE Global, 2022).

Salah satu cara untuk melakukan pencegahan fraud adalah dengan melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah, dikutip dari laman diskominfotik.bengkaliskab.go.id, bahwa Forum Penyuluh Anti Korupsi (FORPAK) Provinsi RIAU melaksanakan sosialisasi dan pencegahan pemberantas tindak pidana korupsi kepada Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) & Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bengkalis. Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar-dasar nilai anti korupsi kepada Kepala OPD dan Kepala desa/lurah agar dapat terhindar dari tindak pidana Korupsi. Indikator desa antikorupsi yang terdiri dari 18 indikator dan memiliki 5 komponen yaitu tata laksana, wawasan, pelayanan, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal (Rills, 2023).

Disamping itu pencegahan fraud pada pemerintah dilakukan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merujuk pada serangkaian prosedur yang diterapkan untuk memantau dan mengendalikan aktivitas dalam organisasi, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan, fraud, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Seperti dikutip dari laman diskominfotik.bengkaliskab.go.id, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meraih peringkat keempat di Provinsi Riau dengan capaian nilai di tahun 2022 sebesar 84,93 dan 83,35 ditahun 2023. Dari tahun 2022 hingga 2023, Pemkab Bengkalis mengalami penurunan MCP sebesar 1,58. Sedangkan pada Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori waspada dari tiga kategori yang ada yakni terjaga, waspada dan rentan (Erlina, 2024).

Dari uraian di atas kasus penyelewengan (fraud) dapat di cegah dengan melakukan pencegahan yaitu dengan meningkatkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian langsung dari pemerintah untuk mengatur pendistribusian dana yang disebut sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut penelitian Prajanti et al., (2024) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan di suatu organisasi atau pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Berbeda dengan penelitian Karyani et al., (2024) yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud

Selain sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi juga upaya untuk mencegah tindakan fraud. Budaya organisasi merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian bagi perusahaan ataupun organisasi dalam upaya pencegahan fraud. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya yang sehat dan kuat akan membuat orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bekerja secara tanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis perusahaan secara baik dan terbebas dari upaya tindakan penyelewengan.

Menurut penelitian yang dilakukan Hambani (2020), menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Sehingga kondisi budaya organisasi yang baik dapat membantu dalam upaya untuk mencegah tindakan fraud yang akan terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, (2021) serta Kusumawati, & Andayani (2024) menyatakan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini menyatakan bahwa pemahaman yang terhadap budaya perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah tindakan

fraud.

Upaya pencegahan fraud lainnya adalah kesadaran anti-fraud (anti-fraud awareness) merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Kesadaran anti-fraud yang efektif akan memperkuat kontrol dalam organisasi hirarkis dan menurunkan fraud dalam organisasi. Menurut Prajanti et al (2024) mengatakan terdapat dua konsep dalam upaya pencegahan fraud selain pengendalian internal, yaitu meningkatkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Naulita (2020) serta Hari et al (2024) Anti-fraud awareness berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan anti-fraud awareness memang dinilai cukup penting dalam mencegah dan meminimalisir resiko fraud. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reskia & Sofie (2022) menyatakan bahwa kesadaran anti-fraud tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ramadhan (2022) yang menggunakan budaya organisasi dan pengendalian internal. Pada penelitian ini penulis menambah variabel anti-fraud awareness. karena dengan Dengan meningkatkan kesadaran akan mekanisme dan konsekuensi fraud, organisasi dapat mengurangi celah atau peluang bagi individu yang mungkin berniat melakukan tindakan penipuan. Perbedaan selanjutnya pada objek yang digunakan, pada penelitian terdahulu adalah pada pencegahan kecurangan pada Pemerintah Desa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sedangkan dalam penelitian ini adalah pada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Bengkalis, alasan mengambil lokasi penelitian di kelurahan pada Kabupaten Bengkalis salah satunya masih ditemukan kasus kecurangan (fraud) pada kelurahan, namun dilihat dari hasil penilaian MCP, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah meningkat dengan kategori waspada.

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai kelurahan yang berada di Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 19 kelurahan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini termasuk teknik *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah sebanyak 4 orang masing-masing ini yaitu Lurah, Sekretaris Lurah, Ketua UEK, dan Bendahara UEK. sehingga secara keseluruhan sampel berjumlah 76 orang

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey* yaitu metode pengumpulan data primer. Adapun teknik metode survey yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner, yang disebarluaskan dengan secara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert yang memiliki rentang skor 1-5.

Tahapan dalam analisis data mencakup uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sebelum menerapkan analisis regresi linier berganda pada data. Untuk menentukan sejauh mana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen yang dianggap konstan, digunakan uji. Alat atau software yang digunakan dalam penelitian adalah software SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) Versi 24.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa uji asumsi klasik merupakan serangkaian evaluasi yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa data dalam analisis regresi memenuhi sejumlah asumsi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang valid dan dapat dipercaya. Berikut ini adalah beberapa uji asumsi klasik yang sering dilakukan dalam analisis regresi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov..

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,40240746
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,041
	Negative	-,042
Test Statistic		,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 1 di atas, uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Dengan membandingkan nilai signifikansi 0,200 dengan nilai probabilitas 0,05, terlihat bahwa nilai signifikansi lebih tinggi daripada nilai probabilitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa data residual mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2021). Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPIP (X1)	0,493	2,030
Budaya Organisasi (X2)	0,698	1,433
Anti Fraud (X3)	0,540	1,853

Sumber: data diolah, 2025

Analisis yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1, yang menandakan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksetaraan varians pada residual berbagai observasi dalam model regresi (Sugiyono, 2022). Jika nilai signifikansi (sig) melebihi 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
SPIP (X1)	0,012
Budaya Organisasi (X2)	0,771
Anti Fraud (X3)	0,471
	0,071

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan analisis yang ditampilkan dalam Tabel 3 di atas, nilai signifikansi untuk variabel SPIP (X1), Budaya Organisasi (X2), dan *anti fraud awareness* (X3) semuanya lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Hasil uji regresi linier berganda

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	7,296	3,279		2,225	,030
SPIP (X1)	,489	,190	,282	2,570	,012
Budaya Organisasi (X2)	,283	,138	,189	2,044	,045
Anti Fraud (X3)	,538	,128	,440	4,198	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan dalam Tabel 4 di atas, diperoleh persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = 7,296 + 0,489 X1 + 0,283 X2 + 0,538 X3$$

Keterangan hasil pengujian di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 7,296 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), budaya organisasi (X2), anti fraud awareness (X3), dianggap konstan (bernilai 0) maka nilai variabel dependen yaitu pencegahan fraud (Y) adalah sebesar 7,296.
2. Koefisien regresi (β_1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) mempunyai nilai positif sebesar 0,489. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebabkan pencegahan fraud naik sebesar 0,489. Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).
3. Koefisien regresi (β_2) budaya organisasi (X2) mempunyai nilai positif sebesar 0,283. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 poin budaya organisasi menyebabkan pencegahan fraud naik sebesar 0,283 Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan)
4. Koefisien regresi (β_3) anti fraud awareness (X3) mempunyai nilai positif sebesar 0,538. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 poin anti fraud awareness menyebabkan pencegahan fraud naik sebesar 0,538 Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan)

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel dependen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 5 Hasil Uji R-Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,608	,590	2,456

a. Predictors: (Constant), Anti Fraud (X3), Budaya Organisasi (X2), SPIP (X1)

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,590 atau 59 %. Artinya Pengendalian Internal Pemerintah (X1), budaya organisasi (X2), anti fraud awareness (X3), mempengaruhi pencegahan fraud (Y) sebesar 59%. Sedangkan sisanya 41% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau anggapan sementara yang diperoleh dari konseptualisasi masalah. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7,296	3,279			2,225	,030
SPIP (X1)	,489	,190	,282	2,570	,012	
Budaya Organisasi (X2)	,283	,138	,189	2,044	,045	
Anti Fraud (X3)	,538	,128	,440	4,198	,000	

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis pertama merumuskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa t hitung (2,570) > t tabel (1,996), dan nilai sig (0,012) < (0,05), maka kriteria keputusannya adalah Ha diterima, artinya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

b. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis kedua merumuskan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa t hitung (2,044) > t tabel (1,996), dan nilai sig (0,045) < (0,05), maka kriteria keputusannya adalah Ha diterima, artinya budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima.

c. Pengaruh Anti Fraud Awareness Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis ketiga merumuskan bahwa *anti fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa t hitung (4,198) > t tabel (1,996), dan nilai sig (0,000) < (0,05), maka kriteria keputusannya adalah Ha diterima, artinya *anti fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, maka semakin baik pula pencegahan *fraud*. Berpengaruhnya sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*, disebabkan Tanggapan responden terhadap indikator SPIP secara umum menunjukkan rata-rata skor yang baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar pejabat kelurahan dan pengelola UEK-SP memahami pentingnya sistem pengendalian internal, serta menerapkannya dalam proses operasional seperti pelaporan, pengawasan, dan pemisahan fungsi. Responden menilai bahwa unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sudah mulai dijalankan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2023), yang menyatakan bahwa penerapan SPIP secara menyeluruh di tingkat pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mencegah praktik *fraud* dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Lebih lanjut, menurut Effendy dan Surya (2022), sistem pengendalian internal yang efektif akan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi kecurangan, meningkatkan akuntabilitas pengelola dana publik, serta menciptakan budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah menjadi sarana untuk mendukung terciptanya perilaku *steward*, karena sistem tersebut menekankan transparansi, akuntabilitas, dan etika kerja yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Davis, et al (1997), dalam teori *stewardship*, kontrol eksternal yang bersifat formal seperti pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk mencurigai, tetapi justru memperkuat struktur organisasi agar individu yang memiliki niat baik dapat bekerja lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat dilihat sebagai instrumen pendukung bagi perilaku *steward*, bukan sebagai alat represif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karyani *et al.*, (2024), Prajanti *et al.*, (2024) Naulita (2020) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik dan kuat budaya organisasi yang tercipta di lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula efektivitas dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hasil ini diperkuat oleh tanggapan responden yang menunjukkan rata-rata skor baik pada indikator budaya organisasi, khususnya dalam hal budaya organisasi yang berorientasi kepada orang dan budaya organisasi yang berorientasi kepada pekerjaan. Budaya organisasi yang berorientasi pada orang mencerminkan nilai-nilai yang menekankan perhatian terhadap kesejahteraan, keterlibatan, dan etika antar individu dalam organisasi. Sementara budaya yang berorientasi pada pekerjaan menunjukkan fokus organisasi terhadap pencapaian tujuan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kedua orientasi ini, menurut tanggapan responden, telah diterapkan secara cukup baik dan seimbang dalam lingkungan kerja UEK-SP, yang pada akhirnya menciptakan suasana kerja yang transparan, terbuka, dan penuh tanggung jawab dan akhirnya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi. Schein (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi membentuk pola pikir dan perilaku anggota organisasi dalam jangka panjang. Budaya yang kuat dan positif tidak hanya membangun etos kerja yang tinggi, tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol informal yang mampu mencegah perilaku menyimpang.

Apabila dikaitkan dengan teori *stewardship*, yang dikemukakan oleh Davis, *et al* (1997), teori ini memandang individu dalam organisasi bukan sebagai agen yang selalu mementingkan kepentingan pribadi melainkan sebagai *steward*, yaitu pelayan yang secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan kolektif. Dalam hal ini, budaya organisasi yang kuat, terutama yang menekankan integritas dan kepedulian sosial, akan memperkuat perilaku *steward* yang bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hambani *et al.* (2020) menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh *Anti Fraud Awareness* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *anti fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu dan organisasi terhadap risiko dan dampak *fraud*, maka semakin efektif pula upaya pencegahannya. Berpengaruh *anti fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud* dapat disebabkan karena responden dalam penelitian ini sudah dapat menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi. melaksanakan evaluasi atas proses *anti-fraud* dan pengendalian dan mengembangkan proses pengawasan yang memadai Skor rata-rata yang baik pada indikator ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki sikap waspada serta etika kerja yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari *fraud* sehingga lebih tahan terhadap risiko penyimpangan

Sejalan dengan pendapat *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran terhadap *fraud* di kalangan pegawai menjadi salah satu strategi paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sejak dulu. Edukasi, pelatihan, serta kampanye *anti-fraud* terbukti dapat membentuk budaya organisasi yang tidak toleran terhadap penyimpangan, sekaligus mendorong partisipasi aktif pegawai dalam pelaporan dan pengawasan internal.

Berdasarkan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa individu dalam organisasi pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan hanya demi kepentingan pribadi. Dalam perspektif *stewardship*, orang-orang dalam organisasi berperan sebagai *steward* atau pelayan yang setia menjaga nilai-nilai etika dan profesionalisme, serta berperilaku berdasarkan rasa tanggung jawab moral. Kesadaran terhadap *fraud* mencerminkan bahwa pegawai tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi juga karena rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, tingginya *anti-fraud awareness* dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari perilaku *stewardship* di lingkungan kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naulita, (2020), Sabrina & Basuki, (2024) menyatakan bahwa *Anti-fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah maka semakin baik pencegahan *fraud*.
2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, semakin budaya organisasi yang diterapkan dengan baik maka semakin baik pencegahan *fraud*
3. *Anti fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, semakin tinggi *anti fraud awareness* yang dimiliki pegawai maka semakin baik pencegahan *fraud*

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya memperluas cakupan sampel tidak hanya terbatas pada Lurah, Sekretaris Lurah, Ketua UEK-SP, dan Bendahara UEK-SP, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang relevan, seperti anggota pengurus lainnya, tokoh masyarakat, penerima manfaat, serta pihak pengawas eksternal atau auditor. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam dan menyeluruh terkait upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan UEK-SP.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti integritas individu, efektivitas pengawasan eksternal, transparansi pelaporan, atau pemanfaatan teknologi informasi. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan *fraud* pada lembaga sejenis.
3. Pemerintah daerah dan pengelola UEK-SP perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembentukan budaya organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, karena budaya tersebut membentuk pola pikir dan perilaku yang mendukung integritas. Selain itu, hasil ini juga mengimplikasikan bahwa implementasi SPIP secara konsisten dapat memperkuat sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dulu. Peningkatan kesadaran anti-*fraud*, melalui pelatihan dan sosialisasi rutin, juga menjadi langkah strategis untuk membangun kewaspadaan dan komitmen semua pihak terhadap pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE.(,2022). Report To The Nations on Occupational Fraud And Abuse. Online. Global *Fraud* Study: <https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-1>
- Az-zahra, O, R, N (2024) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan E-Procurement Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Empiris pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Jambi). *Skripsi*, Universitas Jambi
- Erlina, A (2024) MCP Bengkalis Peringkat Keempat Di Riau Serta Masuk Kategori Waspada Keempat SPI KPK. <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/18704/mpc-bengkalis-peringkat-keempat-di-riau-serta-masuk-kategori-waspada-keempat-spi-kpk>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S., Warizal, W., dan Kusuma, I. C., R. (2020). Analisis Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor)', *Jurnal Akunida*, Vol. 6. No. 2, p. Hal. 69-84.
- Karyani, N. M. M., Kusumawati, N. P. A., & Andayani W, R. D. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 327-337. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i1.4554>
- Kusumawati, R., & Andayani, W. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit*

Publik, 20(1), 45–56

- Naulita, D. M. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Anti-Fraud Awareness* dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan *Fraud*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Prajanti, F. D., Hari, K. K., Sabrina, N., & Basuki, R. (2024). Kesadaran Anti-*Fraud* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Economina*, 3(5), 608–623. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i5.1324>
- Ramadhan, L (2021) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi empiris Pemerintah Desa Kecamatan Pemalang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Restia & Sofie (2022) Pengaruh Internal Audit, Anti *Fraud Awareness*, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi kasus pada PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2 (2) : 419-432 <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14531>
- Rills, (2023) Forpak Riau Taja Sosialisasi Pencegahan Korupsi. https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/17674/to_top
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.